



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 23 Juni 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Virtual / Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2021 dan RKP Tahun 2021 (RKA K-L dan RKP K-L Tahun 2021). 2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2019 3. Evaluasi Kinerja Tahun 2020
Ketua Rapat	: H.YANDRI SUSANTO, SPt.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 42 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 7 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Beserta Jajaran

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.07 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan agenda **“Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021 dan RKP Tahun 2021 (RKA K-L dan RKP K-L Tahun 2021), Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 dan Evaluasi Kinerja Tahun 2020.”** dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tentang APBN Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2021, sebesar 279.568.938.000,- **(Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)** atau mengalami kenaikan sebesar 5,9 miliar rupiah, dibandingkan dengan alokasi tahun 2020, dengan rincian alokasi anggaran untuk program sebagai berikut :

Program	Pagu Indikatif 2021
Program Dukungan Manajemen	Rp 142.352.415.000,- <b>(Seratus Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)</b>
Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp 137.216.523.000,- <b>(Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)</b>

2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pagu anggaran dan usulan tambahan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2021 sebesar Rp 156.596.000.000,- **(Seratus Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah)** bersama Pejabat eselon I Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami dan mengapresiasi penjelasan realisasi serapan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2019 yang mencapai 96,79 % sebesar Rp. 480.206.212.291,- **(Empat Ratus Delapan Puluh Miliar Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)** dari total anggaran

sebesar Rp. 496.145.116.000,- (***Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah***).

4. Komisi VIII DPR RI dapat memahami capaian realisasi anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2020, hingga tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp. 69.800.000.000,- (***Enam Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah***) atau 31,09 % dari total anggaran sebesar Rp 200.770.000.000,- (***Dua Ratus Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah***).
5. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah seperti perdagangan anak, pornografi, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, anak berhadapan dengan hukum, pembatasan pemakaian gadget pada anak dan lain-lain.
  - b. Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar lebih proaktif untuk memastikan terpenuhinya hak – hak anak di era pandemi Covid-19 terutama hak – hak mendapatkan pendidikan yang dilakukan secara jarak jauh (Daring).
  - c. Menjadikan evaluasi berbagai program pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang tidak memberikan dampak signifikan dan mengalihkan program untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19.
  - d. Membuat program terkait dengan pembangunan kualitas keluarga sebagai upaya pencegahan rapuhnya kualitas keluarga dari berbagai masalah terutama pada saat pandemi Covid -19.
  - e. Meningkatkan evaluasi dan monitoring dana dekonsentrasi agar efektif dan tepat sasaran dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.
  - f. Mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk menyiapkan program dan kurikulum sosialisasi untuk membangun

kesadaran masyarakat terutama kaum rentan untuk menahan lajunya penyebaran Covid-19 di era New Normal.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.01 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,



H.YANDRI SUSANTO, Spt.